

SOSIALISME PASAR DI CINA

Fuad Hasan Lubis

Abstrak

Keadaan dunia yang dewasa ini sudah sangat maju dalam segala aspek, memang memaksa negara untuk menyesuaikan iklimnya dengan iklim dunia. Kemajuan dunia ini secara ideologi adalah kemenangan kelompok demokrasi – liberal yang semakin jauh menyebarkan pengaruhnya di dunia. Hal ini tentunya membuat negara-negara yang masih berhaluan sosialis tidak stabil. Mereka terpaksa menggadai ideologinya agar dapat bertahan dalam kondisi dunia yang seperti ini. Tetapi tetap ada juga negara yang masih mengedepankan ideologinya sembari melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi dunia demi kepentingan negaranya. Cina yang dikenal sebagai negara Sosialis-Komunis menjadi contoh dari hal ini. Dimana mereka tetap konsisten dengan ideologinya, kecuali pada aspek ekonomi. Mereka menerapkan sistem keterbukaan pasar sebagai usaha untuk mencapai kemajuan ekonomi bagi negaranya. Saat ini Cina telah membuktikan diri sebagai negara maju dan mampu mempengaruhi dunia lewat kemajuan ekonominya.

Kata Kunci : Sosialisme Pasar, Cina.

A. PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya Perang Dunia II terjadi perubahan besar di banyak negara, salah satu perubahan tersebut adalah perubahan sistem politik dan sistem ekonomi yang dianut menjadi demokrasi dan kapitalisme seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara barat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana teori pembangunan politik didominasi oleh pendekatan modernisasi. Pendekatan ini menggambarkan negara dunia ketiga sebagai negara tradisional bergerak menuju tipe masyarakat modern barat. Pendekatan modernisasi memberikan penjelasan, prediksi dan rekomendasi untuk melakukan pembangunan dalam rangka menjadi masyarakat modern seperti di negara barat.

Terdapat dua pendapat penting pada masa pascaperang dunia ke 2 ini yakni pendapat dari Deutsh dan Lipset. Deutsh berpendapat bahwa pembangunan ekonomi mengarahkan kepada munculnya desakan untuk terciptanya partisipasi politik. Gagasan dari kemajuan dari pembangunan ekonomi menuju demokrasi diperkuat oleh Lipset. Lipset menunjukkan sebuah hubungan yang kuat antara pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pembangunan ekonomi yang lebih tinggi yang dinikmati oleh satu negara dapat diukur dengan tingkat pendidikan dan keterbukaan media massa, menjadi lebih mungkin untuk menerapkan demokrasi (Denny, 2006: 2).

Dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi sangat signifikan dalam mendorong terciptanya demokrasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tingkat ekonomi yang sehat menghasilkan perilaku tertentu dalam suatu masyarakat. Kedua, pembangunan ekonomi meningkatkan taraf pendidikan dalam suatu masyarakat. Ketiga, pembangunan ekonomi menghasilkan sumberdaya-sumberdaya yang

lebih besar. Keempat, pembangunan ekonomi mendukung terbukanya perdagangan asing, pariwisata, komunikasi dan keterbukaan pada meningkatnya globalisasi dunia. Kelima, pembangunan ekonomi melahirkan kelas menengah. Masyarakat bisnis, profesional dan berbagai kelompok dalam masyarakat sipil tumbuh sejalan dengan pembangunan ekonomi dan pendidikan (Brown, 2000: 224).

Adanya hubungan pembangunan ekonomi dengan terciptanya demokrasi seperti yang diuraikan di atas mengakibatkan banyak negara yang awalnya menerapkan sistem politik otoritarian beralih ke demokrasi. Tercetusnya gelombang demokratisasi ini karena terdapat ketidakpuasan dari kegiatan ekonomi yang dimainkan oleh rejim otoriter, seperti komunisme, ultranasionalisme (fasis) sehingga penguasa rejim dengan mudah kehilangan kekuasaan ketika mereka gagal menghasilkan prestasi di bidang ekonomi. Keberhasilan menciptakan kemajuan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi membuat konsep demokrasi-kapitalis memiliki daya pikat bagi negara-negara lain yang ingin membangun perekonomiannya. Meskipun begitu, hasil kemajuan yang diperlihatkan dari demokrasi-kapitalis ternyata tidak membuat negara-negara tertentu untuk merubah sistem politik negaranya menjadi demokratis. Masih terdapat negara-negara yang berpegang teguh terhadap sistem politik yang tidak demokratis seperti sosialis-komunis namun secara ekonomi dapat juga tumbuh seperti apa yang dipraktikkan di negara-negara demokrasi kapitalis. Contoh yang tepat dalam hal ini adalah negara Cina yang secara politik masih menganut paham komunisme tetapi perekonomiannya maju dengan pesat.

Cina mengalami angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan menjadi fenomena yang menarik untuk diuraikan serta mendapat perhatian serius dari banyak kalangan. Cina yang saat ini masih dikategorikan dalam negara penganut ideologi sosialis-komunis mampu menciptakan kemajuan ekonomi yang signifikan, serta mampu bersaing dengan negara-negara yang menganut ideologi kapitalisme yang menggunakan pendekatan pasar bebas dalam kegiatan perekonomiannya. Fenomena ini sangat menarik untuk dicermati karena apa yang terjadi di Cina sekarang ini sangat kontras bila melihat negara-negara sosialis-komunis lain yang masih tersisa yang selalu diidentikkan dengan keterpurukan ekonomi dan kemiskinan. .

B. PENDEKATAN METODE

Studi ini dilakukan dengan pendekatan ekonomi politik. Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Teknik analisa data adalah teknik metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti berdasarkan data dan informasi.

C. PEMBAHASAN

Gagasan Sosialisme Pasar

Sosialisme pasar adalah salah satu model reformasi ekonomi yang pertama kali diterapkan di negara-negara Eropa Timur khususnya Uni Soviet pada tahun 1920-an. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem perencanaan terpusat Uni Soviet, dengan cara menggantikan bentuk perintah pusat dengan hubungan kontraktual, pemberian kredit untuk menggantikan hibah anggaran, pemberian insentif material, dan mempercanggih sistem untuk menghadapi sistem pasar, terutama pasar dunia.

Sebagai model teoritis, sosialisme pasar baru dikembangkan di barat pada tahun 1930-an oleh Oscar Lange. Oscar Lange adalah seorang penganut Marxisme dan berprofesi sebagai ekonom yang pertama kali mencetuskan gagasan tentang sosialisme pasar. Gagasan ini awalnya muncul sebagai upaya untuk mengatasi kritik dari Ludwig von Mises bahwa alokasi sumber daya rasional tidak mungkin dapat dilakukan dalam ekonomi sosialis, Lange mengusulkan bahwa negara menggunakan pasar bebas, bukan ekonomi perencanaan terpusat, untuk mengalokasikan tenaga kerja dan semua barang yang dikeluarkan oleh perusahaan negara. Negara tetap mempertahankan kepemilikan modal dan sumber daya alam, namun menjalankan mekanisme harga sebagai upaya untuk meniru mekanisme pasar persaingan sempurna. Perusahaan pribadi atau swasta tidak diperkenankan, namun perusahaan milik negara (BUMN) bertindak sesuai dengan aturan produksi yang efisien, dan keuntungan yang diperoleh BUMN ini akan diserahkan kepada negara sebagai dividen sosial (Parker, 1995: 10).

Ekonomi pasar sosialis juga dapat dipahami sebagai pasar yang diawasi atau diatur, dan peraturan tersebut biasanya dalam bentuk pengendalian harga, namun negara tetap berada di luar sistem pasar dan negara melakukan transaksi yang terbuka di dalam pasar sebagaimana lazimnya pasar tersebut beroperasi. Sosialisme pasar juga dianggap sebagai ekonomi campuran dengan intervensi negara yang moderat dan penerapan kebijakan sosial. Dengan demikian gagasan sosialisme pasar dipahami sebagai ekonomi campuran yang masih menggunakan kepemilikan publik dan Partai Komunis yang dominan tetapi melegalkan sistem pasar beroperasi yang diatur melalui kebijakan publik, dan dengan bentuk pluralisme politik. (Nuti, 1992:18).

Selain model yang telah disebutkan sebelumnya, para ahli lain yang juga mendukung sosialisme pasar menghasilkan model sosialisme pasar. Seperti yang dilakukan oleh John Roemer, yang mengajukan argumen bahwa sosialisme pasar terlihat seperti kapitalisme kontemporer, tapi dengan lima perbedaan mendasar, yakni: (Schweickart, 1998: 15)

Semua saham dari semua perusahaan di negara tersebut didistribusikan ke setiap warga negara. Setiap warga saat lahir menerima portofolio saham, dan karenanya memperoleh hak pembagian dividen yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika warga negara meninggal, saham tersebut dikembalikan ke pemerintah. Saham ini dapat diperdagangkan untuk saham lain, tetapi tidak dapat dijual untuk mendapatkan uang tunai. (Oleh karena itu tidak mungkin bagi orang kaya untuk membeli saham orang miskin dan memperoleh pengendalian atas perekonomian).

Semua bank dinasionalisasi. Bank-bank ini menghimpun dana dari penabung swasta dan membuat pinjaman untuk bisnis, menggunakan kriteria substansial yang sama dengan bank-bank kapitalis. Manajemen korporasi ditentukan oleh dewan direksi perusahaan, yang terdiri dari delegasi dari bank komersial utama yang memberikan pendanaan, perwakilan dari para pekerja perusahaan, dan perwakilan dari pemegang saham. Pemerintah melakukan perencanaan investasi yang signifikan, dengan menggunakan tingkat bunga diferensial untuk mendorong atau mencegah beberapa jenis investasi tertentu. Perusahaan-perusahaan kapitalis diperbolehkan jika dimulai oleh seorang pengusaha, tapi sebuah perusahaan akan dinasionalisasi (dengan kompensasi)

saat mencapai ukuran tertentu, atau pada saat pendirinya meninggal dunia, dan sahamnya didistribusikan kepada masyarakat umum.

Model ini juga mengatasi dua masalah yang paling mendasar dalam kapitalisme: kesenjangan ekonomi dan investasi yang irasional. Kesenjangan ekonomi secara tajam dibatasi (meskipun tidak dihilangkan) secara drastis dengan mengurangi sumber pendapatan utama kapitalis, yakni pendapatan yang timbul dari kepemilikan alat-alat produksi. Investasi yang irasional juga dapat diatasi. Model Roemer ini mengakui secara eksplisit mekanisme pasar tidak efisien untuk membuat keputusan investasi yang menentukan kesehatan ekonomi jangka panjang. Tangan terlihat pemerintah harus melengkapi tangan tak terlihat seperti yang diutarakan oleh Adam Smith.

Model lain dari sosialisme pasar yang semakin berkembang adalah model demokrasi ekonomi yang menempatkan manajemen pekerja yang mengelola sendiri perusahaan sebagai jantung dari sistem perekonomian. Dalam Demokrasi Ekonomi ini tidak ada pasar saham, sehingga bentuk kepemilikan saham tidak diperkenalkan. Aset yang dimiliki oleh negara dianggap properti secara kolektif, tetapi aset tersebut dikendalikan oleh tenaga kerja yang memanfaatkannya untuk meraih keuntungan. Artinya, masing-masing perusahaan dijalankan secara demokratis, dengan pekerja yang diberdayakan secara hukum, satu orang pekerja memiliki satu suara untuk memilih manajemen perusahaan. Model untuk suatu perusahaan di bawah Demokrasi Ekonomi adalah bentuk komunitas politik, bukan milik pribadi. Suatu perusahaan bukanlah 'benda' yang dimiliki oleh pekerja, melainkan sebuah asosiasi yang diatur sendiri oleh mereka. Otoritas tertinggi berada di tangan para pekerja perusahaan, meskipun perusahaan mereka adalah perusahaan kecil, pekerja tetap memilih wakil-wakil untuk dewan pekerja yang akan memilih dan mengawasi manajemen perusahaan (Schweickart, 1998: 17-19).

Selain yang telah diuraikan di atas, berbagai model teoritis sosialisme pasar telah diusulkan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi semua pendukung sosialisme pasar setuju pada empat poin utama (Schweickart, 1998: 10).

Pasar tidak harus diidentifikasi dengan kapitalisme. Perencanaan terpusat adalah mekanisme ekonomi yang harus dihindari. Terdapat alternatif kebijakan yang berciri sosialis, yang diperlukan ketika pasar tidak berjalan secara efektif, sehingga memerlukan mekanisme yang penting untuk mengatur ekonomi dalam kondisi kelangkaan.

Beberapa bentuk dari sosialisme pasar bersifat lebih ekonomis dan jauh lebih baik daripada kapitalisme.

Sosialisme Pasar di Cina

Sistem sosialisme pasar atau yang sering juga disebut dengan sistem ekonomi pasar sosialis adalah kategori baru dari ajaran Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Cina. Kemunculan sistem ini pertama kali dilandasi oleh istilah sistem ekonomi komoditas sosialis yang dikemukakan oleh Zhuo Jiong. Istilah ekonomi pasar sosialis sudah digunakan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1979 dalam pidatonya dengan berlandaskan pada prinsip Sosialisme dengan Karakteristik Cina (Wang, 2005: 2).

Konsep ini merupakan hasil pemikiran para intelektual Cina yang di dalamnya terdapat perbedaan dengan transisi sistem pasar di sebagian besar negara pecahan Uni Soviet dan Eropa Timur yang bergantung pada penasehat ekonomi asing khususnya yang berasal dari barat dalam merumuskan sistem pasarnya. Meskipun begitu, tidak dapat dinafikan bahwa pengetahuan yang diadopsi dari teori ekonomi barat menjadi salah satu inspirasi dalam formulasi sistem ekonomi pasar ini.

Masuknya pengetahuan dan teori ekonomi barat ini ke Cina adalah buah dari kebijakan Deng Xiaoping yang melakukan pertukaran akademisi dengan negara barat dan Eropa Timur yang terjadi sepanjang tahun 1980-an. Pada periode yang sama ini juga berlangsung perdebatan di kalangan intelektual mengenai langkah-langkah strategi reformasi apa yang harus dilakukan. Para pemimpin Cina yang juga memiliki pengaruh kuat di dalam PKC beserta para pakar ekonomi terbagi menjadi dua kubu utama, yakni golongan pemimpin dan ekonom yang mengadvokasi dan mempertahankan perencanaan terpusat sebagai langkah reformasi, dan golongan pemimpin dan ekonomi yang merekomendasikan reformasi berorientasi pasar. Golongan pertama menganggap bahwa masalah yang dihadapi Cina kala itu adalah akibat dari ketidaktepatan orientasi reformasi Cina ke arah pasar, sedangkan golongan kedua berpendapat bahwa masalah terjadi akibat implementasi sistem pasar yang tidak ideal dan parsial. Xue Muqiao yang merupakan seorang ahli ekonomi dan juga pejabat negara yang penting, mengajukan reformasi pada sistem kontrol harga dan jalur sirkulasi dalam rangka menghapus sistem kontrol harga secara bertahap dan mengkonstruksi pasar komoditas dan finansial. Namun, gagasan golongan kedua belum dapat diterima sepenuhnya saat itu dan perdebatan berakhir dengan hasil negosiasi dan kompromi politik yang menetapkan ekonomi terencana sebagai pilar utama dan mekanisme pasar hanya sebagai suplemen (Wu, 2005:26). Meskipun demikian, gagasan yang dikembangkan pada masa ini berkontribusi dan memengaruhi perumusan sistem ekonomi pasar sosialis pada tahun 1992-1993 (Qian, 2003:41).

Perdebatan intelektual yang terjadi saat itu setidaknya memunculkan beberapa ide utama, antara lain (1) Pembentukan institusi pendukung pasar, seperti sistem perpajakan dan finansial, serta liberalisasi harga (2) Reformasi hak properti, kepemilikan dan saham. Pada tahun 1990-an dilakukan studi komprehensif mengenai aspek-aspek sistem ekonomi pasar, termasuk kedua hal tersebut. Sebuah tim peneliti pada tahun 1990 – ketika reformasi Cina terpuruk pascainsiden Lapangan Tiananmen 1989 – mulai merancang desain reformasi ekonomi yang terintegrasi. Tim peneliti ini menggunakan konsep ekonomi institusional baru dan pendekatan ekonomi neoklasik untuk mempelajari berbagai aspek reformasi ekonomi guna mencari ‘jalan tengah’ dan mampu merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi Cina sekaligus mengakomodir kepentingan Cina yakni adopsi sistem pasar sekaligus menjalankan kepatuhan terhadap unsur ekonomi sosialis.

Kombinasi pengetahuan ekonomi barat, pengalaman praktik ekonomi pasar, serta konsep ekonomi sosialis inilah yang menjadi bahan baku bagi para ekonomi Cina untuk memformulasikan konsep sistem ekonomi pasar sosialis (Qian, 2003: 40-42). Formulasi ekonomi pasar sosialis ini kemudian dikemukakan oleh Jiang Zemin yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin tertinggi PKC pada waktu Kongres PKC XIV 1992-1993.

Sosialisme Pasar Dalam Praktik

Pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat menarik perhatian dunia tidak dapat dilepaskan dari penerapan Sosialisme Pasar dengan karakteristik Cina yang merupakan hasil pemikiran dari Bapak Reformasi Cina yakni Deng Xiaoping yang kemudian dilanjutkan oleh Jiang Zemin sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis Cina. Langkah Presiden Jiang Zemin dan Perdana Menteri Zhu Rongji dalam melanjutkan pembangunan ekonomi sekaligus untuk mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri adalah dengan semakin membuka diri dan ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional. Para ahli ekonomi politik mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Cina ini merupakan model dari kapitalisme negara (state capitalism) yang mulai banyak ditiru setelah kegagalan kapitalisme neoliberal.

Mengutip dari pandangan Ian Bremmer (2010: 59), kapitalisme negara adalah sebuah sistem ketika negara mendominasi pasar, terutama untuk keuntungan politik. Negara menggunakan pasar untuk menaikkan posisi tawar mereka dalam bidang politik dan perekonomian – baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Versi Cina untuk menjalankan kapitalisme negara dimulai di titik yang sentral dalam pemerintahannya yakni dalam Dewan Negara, sebagai pemegang kekuasaan administratif utama di Cina. Dewan ini diketuai oleh Perdana Menteri dan beranggotakan setiap kementerian dalam kabinet. Yang paling penting dalam birokrasi ini untuk manajemen sehari-hari perekonomian dalam negeri adalah Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi, yang mengarahkan perencanaan ekonomi makro serta intervensi pasar, khususnya melalui penetapan harga-harga untuk banyak produk dan pengaruhnya terhadap perusahaan-perusahaan minyak nasional serta badan-badan usaha milik Negara.

Untuk melegitimasi monopolinya atas kekuasaan politik dalam negeri, pucuk pimpinan Partai Komunis Cina percaya bahwa mereka harus menciptakan jutaan lapangan kerja baru setiap tahun. Hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk memastikan agar harapan yang meningkat atas kemakmuran dapat terpenuhi dan agar perubahan status warganegara dari penganggur miskin menjadi tenaga kerja dapat memacu pertumbuhan lebih lanjut dan tidak akan menjadi ancaman terhadap ketertiban sosial. Para pemimpin Cina tahu melalui pengalaman yang pahit bahwa sistem ekonomi terpimpin secara konsisten tidak mampu memenuhi tantangan itu. Mereka juga tahu bahwa untuk melestarikan pertumbuhan yang tinggi dalam tahun-tahun mendatang, perusahaan-perusahaan Cina, dengan setiap dukungan kemudahan yang dapat disediakan oleh negara, harus terjun ke dunia luar guna mengamankan akses jangka panjang ke sumber-sumber minyak mentah, gas alam, logam, mineral dan komoditas-komoditas lain dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomiannya yang berkembang tetapi masih rentan. Dengan kata lain, Cina tidak semata-mata terbuka untuk dunia usaha. Elit politiknya telah lama memilih strategi untuk merekayasa pembangunan Cina, dan negara ini memanfaatkan perusahaan-perusahaan milik negara, dana kekayaan negara, serta kekuasaan politik dalam negeri untuk melakukannya.

Implikasi Positif Sosialisme Pasar di Cina

Dari praktik Sosialisme Pasar yang dilakukan oleh Cina terdapat beberapa implikasi positif yang di dapat. Salah satunya adalah kemajuan ekonomi. Cina

mengalami kemajuan ekonomi terkhusus saat sudah resmi menjadi anggota WTO pada 2001. Ekonomi Cina menjadi yang terbesar kedua di dunia dan Cina menjadi salah satu mitra dagang terbesar bagi negara ekonomi maju. Cina telah menjadi penerima investasi asing langsung (FDI) terbesar diantara negara-negara berkembang dan perusahaan investasi luar negeri Cina telah aktif dan mulai menunjukkan pengaruh dalam skala global (Wang, 2012: 46).

Impor dan ekspor Cina telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Dimana pada tahun 1987, ekspor Cina hanya sekitar 1,82% dari total ekspor dunia, dan mengalami kenaikan menjadi 4,48% pada tahun 2001, dan pada tahun 2008 meningkat lagi mencapai 9,35%, dan pada tahun 2010 dengan total 10,57%, ini menunjukkan ekspor Cina telah menguasai lebih dari sepersepuluh dari total ekspor dunia.

Cina mendapatkan predikat terbaik di dunia internasional sebagai tujuan utama bagi investasi asing langsung selama bertahun-tahun. Meskipun reformasi ekonomi di Cina memainkan peran sentral dan fundamental, terdapat banyak faktor penting bagaimana Cina mampu menarik jumlah FDI dalam jumlah besar. Salah satu faktornya adalah bahwa orang-orang Cina perantauan telah berinvestasi di Cina, terutama orang-orang Cina yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara, HongKong, Taiwan dan Makao. Kedua, jumlah penduduk Cina yang besar menyediakan pasar yang luas yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan asing yang mencari pelanggan baru untuk produk mereka. Ketiga, Cina memiliki tenaga kerja murah yang berlimpah dengan memiliki keterampilan yang relatif baik. Banyaknya tenaga kerja merupakan kondisi yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan asing untuk memindahkan pabrik-pabrik mereka ke Cina. Dan keempat, lingkungan makro di Cina selalu membaik, termasuk pemerintahan yang stabil dan infrastruktur yang terus menerus diperbaiki (Wang, 2012: 46).

Investasi merupakan aspek utama penunjang ekonomi di Cina. Kekuatan investasi Cina diduga sebagai instrument yang paling signifikan dan efektif. Dengan pertumbuhan rata-rata 9,8%, Cina diduga akan menjadi negara ekonomi terbesar dalam beberapa dekade mendatang. Pada akhir tahun 2008, Cina adalah negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia dengan nilai AS\$ 1,9 triliun. Investasi Cina di dunia pada tahun 2007 dilaporkan sebesar AS\$18,7 miliar dengan total keseluruhan mencapai AS\$ 93,7 miliar. Trend ini mengindikasikan keuntungan dari surplus perdagangan dan investasi asing (FDI) yang diperoleh Cina. Peningkatan usaha secara umum adalah prioritas kebijakan luar negeri Cina dan Cina juga melihat investasi yang lebih besar hampir di setiap wilayah di dunia.

Kemajuan ekonomi Cina dengan menerapkan Sosialisme Pasar tidak hanya memberikan implikasi kepada perekonomian Cina, tetapi juga berimplikasi kepada perpolitikan di Cina, munculnya masyarakat sipil dalam artian yang umum, masyarakat sipil berkaitan dengan ruang bagi organisasi dan kegiatan sosial bagi masyarakat yang didapat dari kebebasan yang diberikan oleh negara. Masyarakat sipil juga sering merujuk pada kemampuan masyarakat untuk membatasi kekuasaan negara yang terlalu berlebihan. Konsep masyarakat sipil menjadi lebih populer pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan munculnya gerakan sosial melawan rezim komunis di Eropa Timur. Melalui evolusi besar reformasi ekonomi Cina, bentuk masyarakat sipil juga berkembang

di negeri ini. Namun hubungannya dengan negara masih berlangsung secara fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Masyarakat masih pada tahap pembentukan dan beroperasi dalam konteks liberalisasi informal dan negara masih sangat dapat mempengaruhi masyarakat jika hal itu dibutuhkan. Terdapat beberapa tanda munculnya masyarakat sipil bergaya Cina, seperti yang akan diuraikan di bawah: (Zhang, 2000: 99)

Pertama, banyak asosiasi bermunculan untuk mewakili kepentingan anggotanya meskipun hanya mewakili hal-hal yang tidak begitu penting. Dengan mengubah struktur ekonomi dan sosial Cina, negara tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk berkomitmen mengatasi masalah dan isu-isu yang semakin meningkat.

Kedua, perkembangan yang menarik dalam proses reformasi ekonomi adalah bahwa pers, termasuk media yang dikelola negara, telah diminta untuk membiayai dirinya sendiri di pasar terbuka. Dengan perubahantersebut, pers dan media Cina telah menjadi semakin beragam. Sementara masih di bawah tekanan partai, mereka juga berada di bawah tekanan untuk membuat keuntungan. Akibatnya, propaganda telah sebagian digantikan oleh iklan mengkilap, cerita sensasional dan cakupan hidup peristiwa domestik dan internasional. Seperti disebutkan sebelumnya, liberalisasi Cina masih merupakan secara informal dan belum dilembagakan sepenuhnya. Masih pada batas yang tegas pada seberapa jauh media dapat menjalankan fungsinya. Misalnya, media tidak secara kritis menekan pemimpin partai atas kebijakan utama yang dikeluarkan partai. Departemen propaganda partai masih memegang fungsi pengawasan yang ketat padapers dan media atas topik yang sangat sensitif seperti kontrol kelahiran, hak asasi manusia dan hubungan Beijing-Taipei. Dan meskipun institusi media telah menjadi jauh lebih terbuka dari sebelumnya, mereka tidak menikmati kemerdekaan editorial.

Ketiga, setelah berjalanya reformasi dengan berorientasikan kepada pasar, mulai tumbuh pengakuan tentang perlunya aturan hukum. Selama era Mao, hukum adalah alat politik dan administrasi partai. Didorong oleh logika ekonomi pasar, telah terjadi kesadaran yang tumbuh dari kebutuhan untuk keadilan hukum. Sentimen ini diungkapkan di semua tingkat masyarakat. Pemimpin Cina umumnya menyadari sekarang bahwa ekonomi pasar harus diatur oleh hukum. Kesulitan besar yang dialami pemerintah Cina dalam pemungutan pajak telah mendorong pemimpin Cina bahwa ekonomi modern harus didasarkan pada aturan hukum. Kebutuhan untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung juga telah memberikan dorongan yang kuat untuk mempromosikan aturan hukum, karena investor memerlukan konsistensi dan transparansi dalam hukum untuk membuat kesepakatan bisnis. Reformasi pasar dalam banyak hal juga menjadi kekuatan yang mendorong reformasi hukum, karena orang-orang menjadi semakin frustrasi dengan sistem hukum yang lemah.

Implikasi Negatif Sosialisme Pasar di Cina

Selain karena faktor pertumbuhan penduduk yang begitu besar di Cina, reformasi BUMN termasuk di dalamnya privatisasi perusahaan-perusahaan negara juga menyumbang jumlah pengangguran yang besar di Cina. Pada masa Cina menerapkan sistem ekonomi perencanaan terpusat, negara menjamin pekerjaan dengan bekerja di BUMN dengan menggunakan sistem “mangkuk nasi besi”. Sistem “mangkuk nasi besi” itu menyediakan jaring pengaman kesejahteraan sosial mulai dari lahir hingga meninggal

dunia, meliputi jaminan pekerjaan, upah yang layak untuk hidup, perumahan, dan perawatan kesehatan cuma-cuma dan pensiun (Naughton, 2007: 109).

Pada masa Cina dibawah pemerintahan Jiang Zemin, pemerintah mempercepat penghapusan sistem mangkuk nasi besi, dan mendukung perusahaan-perusahaan untuk menganut pasar bebas yang sebagian besar dipacu oleh penanaman modal asing. Tujuan pasar bebas merupakan privatisasi yang dilakukan secara cepat, yang dramatis bagi banyak tenaga kerja dan menjadikan industri Cina mampu bersaing dengan industri-industri lain di dunia. Namun, efek praktis reformasi ini justru membantu menciptakan keadaan penduduk yang mengambang tersebar seperti pekerja yang menganggur penuh, dan setengah menganggur yang belum pernah terjadi sebelumnya (Naughton, 2007: 106). Menurut surat kabar *The Times* (London), melalui privatisasi ini Pemerintah Cina telah menutup 41 juta lapangan kerja BUMN dan 21 juta lagi pada koperasi (Navarro, 2006: 76).

Tingginya tingkat pengangguran di Cina tidak hanya menciptakan upah buruh yang rendah dan kondisi kerja yang menakutkan. Dalam banyak kasus, pengangguran juga sering menyebabkan terjadinya jenis perbudakan modern. Banyak ditemui kasus yang menunjukkan upah yang benar-benar hak buruh tidak dibayar oleh pengusaha atau majikannya, dan jumlah uang yang ditahan tersebut nilainya mencapai miliaran dolar setiap tahun. Ini paling lazim terjadi bagi buruh-buruh migran di kota-kota di Cina yang dengan kejam dieksploitasi karena status mereka sebagai kelas dua. Persoalan tersebut paling parah ditemukan dalam industri konstruksi yang hingar bingar di Cina. Pekerja-pekerja migran dikumpulkan dalam sebuah penampungan dan sehari-harinya hanya diberi makan tetapi upah mereka di tahan. Zhou Xiaozheng, seorang pakar sosiologi dari Universitas Rakyat Cina di Beijing mengatakan Cina mempunyai 10 juta orang budak, yang sehari-harinya diberikan pekerjaan dan makanan tetapi tanpa upah (Navarro, 2006: 176).

Sosialisme pasar yang dianut Cina mengijinkan beroperasinya mekanisme pasar memang memberikan peningkatan penghasilan rakyat. Namun, di sisi lain hal tersebut menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi. tidak hanya antar penduduk kota, tapi juga antara penduduk kota dan desa. Ada tiga hal yang membuat kesenjangan ekonomi semakin melebar di Cina. Pertama, Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Cina yang lebih memfokuskan pembangunan di kawasan pantai timur Cina dengan memberikan banyak zona ekonomi khusus baru yang semakin gencar dilakukan setelah Cina memutuskan untuk semakin berintegrasi dengan pasar ekonomi global.

Penyebab kedua yang membuat kesenjangan ekonomi semakin melebar adalah adanya koneksi atau hubungan yang baik dengan orang-orang berpengaruh di Cina. Mereka yang memiliki koneksi yang baik mendapatkan perlakuan istimewa dan akses yang lebih baik untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi kapital. Ini adalah penyebab utama ketimpangan di Cina karena mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik bukan dari sistem kompetisi yang adil, kegiatan bisnis yang dipermudah, dan akses ke peluang investasi properti. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dari pejabat yang berwenang di Cina, jadi meskipun reformasi ekonomi telah semakin berkembang di Cina dengan kemajuan mekanisme pasar yang juga semakin canggih tapi tidak diiringi dengan reformasi di tubuh

pemerintahan atau birokrat Cina, sehingga praktik-praktik kolusi yang hanya menguntungkan segelintir pihak masih terus terjadi. Penyebab terakhir dari kesenjangan ekonomi adalah adanya praktik-praktik korupsi. Adanya koneksi seperti yang telah disebutkan sebelumnya juga sangat berpeluang untuk menyebabkan terjadinya korupsi. Biasanya korupsi dilakukan dengan menerima suap agar pihak lain mendapatkan akses atau kemudahan dalam berbisnis atau korupsi yang dilakukan secara langsung dengan memanipulasi keuangan pemerintah atau menarik pajak dari masyarakat secara semena-mena.

Dampak lain belakangan ini Cina mengalami instabilitas politik yang cukup menyita perhatian Partai Komunis Cina. Instabilitas ini muncul karena ketidakpuasan atas pembangunan ekonomi yang belum mampu meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Cina khususnya rakyat miskin di pedesaan maupun di perkotaan. Reformasi ekonomi dan privatisasi industri di Cina menciptakan suatu pasukan cadangan pengangguran yang jumlahnya lebih dari 100 juta orang. Daerah pedalaman Cina telah menjadi tempat penampungan buruh budak dan tempat pembuangan semua polutan udara dan air yang ada, sementara kaum tani pedesaan sedang dihisap hingga kering yang dilakukan oleh para petugas pajak pemerintah. Orang-orang miskin yang jumlahnya mencapai jutaan mengalami penggusuran dari tempat tinggal mereka demi pembangunan proyek-proyek waduk yang agresif dan serbuan pembangunan industri.

D. KESIMPULAN

Penerapan sosialisme pasar di Cina memang memberi pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup negara Cina. Pengaruh tersebut tentunya ada yang positif dan negatif. Walaupun sistem keterbukaan ekonomi ini membuat persaingan di internal Cina cukup tinggi sehingga memicu banyaknya pengangguran yang berdampak kepada kemiskinan, tetapi hal ini juga membuat Cina semakin disegani dalam konstelasi perekonomian dunia lewat manuver – manuver ekonomi, serta investasi – investasi besar yang dilakukannya.

Hal yang pasti dari penerapan ini adalah adanya kemajuan ekonomi yang dialami Cina sejak sebelum menggunakan sistem ini dan setelah menggunakannya. Kemajuan ekonomi ini juga tidak hanya mendorong terciptanya kemakmuran bagi masyarakat Cina, tapi juga meningkatkan pengaruh Cina di dunia internasional, hal ini dikarenakan Cina mampu mempergunakan hasil-hasil dari kemajuan ekonominya untuk memperbesar *soft power* dan memberikan pengaruh kepada negara-negara lain. Dengan adanya *soft power* yang meningkat ini tentu memberikan efek yang baik bagi Cina karena dapat mempengaruhi dunia internasional dalam pencapaian kepentingan nasional Cina.

DAFTAR REFERENSI

- Boumol, William J. (2007). *Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity*. Yale University Press
- Bremmer, Ian. (2010). *The End Of Free Market, Who Wins the War Between States and Corporation?*. New York: Penguin Books
- Brown, Bernard. E. (2000). *Comparative Politics Notes and Reading*. Belmont: Thomson Learning
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana

- Chilcote, Ronald H. (2003). *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Dahana, A. 1997. *Berita Dari Tembok Besar*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Denny J.A. (2006). *Various Topics In Comparative Politics*. Yogyakarta: LKIS
- Dryzek, John. R. (2004). *Democratic Political Theory*, dalam Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas, (2004) *Handbook of Political Theory*, London: Sage Publication
- Fakih, Mansour.(2008). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis. (2004). *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta : Qalam
- Huntington, Samuel. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century*. USA: University of Oklahoma Press
- Kuncoro, Mudrajad. "Politik Reformasi ala Cina", dalam *Gatra* (31 Juli 2004).
- Leiva, Fernando Ignacio. (2008). *Latin American Neoliberalism, The Contradictions of Post-Neoliberal Development*. Minneapolis : The University of Minnesota
- Lin, George C.S. (1997). *Red Capitalism in South Cina*. Vancouver: University of British Columbia Press
- Mark Lam, N dan John L Graham. (2008). *Cina Now*. Jakarta : Gramedia.
- Meisner, Maurice. (1999). *Cina's Mao and After: the History of People's Republic*. New York: Free Press.
- Moleong, Lexy J. (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, Poltak Partogi , (1995). *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Naughton, Barry. (2007). *The Chinese Economy, Transitions and Growth*. Massachusetts: The MIT Press
- Navarro, Peter. (2006). *The Coming China Wars*. New Jersey: FT Press
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nuti, Domenico Mario. *Market socialism: the model that might have been - but never was*. Dalam Anders Aslund (edt). 1992. *Market Socialism or the restoration of capitalism?*, Great Britain: Cambridge University Press
- Nye, Joseph. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs
- Qian, Yingyi, Jinglian Wu. (2003). "China's Transition to a Market Economy: How Far Across the River." *How Far Across the River: Chinese Policy Reform at the Millenium*. Ed. Nicholas C Hope, Dennis Tao Yang and Mu Yang Li. Stanford University Press.
- Qiu, Larry D. (2000). *Case Study : People's Republic of Cina*. Dalam Asian Export oleh Philip K. Dass. New York : Oxford University Press.
- Schweickart, David. *Market Socialism: A Defense* dalam Bertell Ollman (edt).1998. *Market Socialism, The Debate Among Socialists*. New York: Routledge
- Tenev, Stoyan, Chunlin Zhang, and Loup Brefort. (2002). *Corporate Governance and Enterprise Reform in China: Building the Institutions of Modern Markets*. Washington: World Bank Publication
- Wang. Yiwu. (2005). *Ilmu Ekonomi Pasar – Pengantar Ekonomi Pasar Cina* (terj). Beijing: Tsinghua University Press.
- Wu, Jinglian. (2005). *China's Long March Toward a Market Economy*. San Fransisco: Long River Press.

Xiaoping, Deng. (1993). *Selected Works* (English edition) Vol II. Beijing: the People's Publishing House

Zhang, Wei-Wei. (2000). *Transforming China, Economic Reform and its Political Implications*. Great Britain: Macmillan Press LTD

Tesis :

Aurora. Clara. (2012). *Kebijakan Keamanan Energi Cina: Studi kasus diplomasi Energi Cina di Afrika*. Jakarta: Hubungan Internasional UI.

Jurnal

Cuneyt Koyuncu dan Pasim Yilmaz, "Can Cina help Lower World Inflation", *Emerging Market Finance and Trade*, vol. 42, no. 2 (March-April 2006)

Huo, Jack W. Dept. of Economics, California State University, School of Economics, Henan University, *China Economic reform of China: Cause and effects*, *The Social Science Journal* 48 (2011) 419–434, www.elsevier.com/locate/soscij

Li, Ling. *The path to Made-in-China: How this was done and future prospects*. *Int. J. Production Economics* 146 (2013) 4–13

Kurlantzick, Joshua . "China's Charm: Implications of China's Soft Power". Policy Brief No. 47, Carnegie Endowment for international Peace, Juni 2006

Parker, Elliot. *Prospect for The State-Owned Enterprise in China's Socialist Market Economy*. *Asian Pespevtive* 19(1) 1995: 7-35

Prime, Penelope B. *China Joins the WTO: How, Why and What Now?*. *Business Economics*, vol. XXXVII, No. 2 (April, 2002)

Rogers, Phillippe D. *China and the United Nations Peacekeeping Operations in Africa*. *Naval War College Review* 60. No. 2. 2007

Tisdell, Clem. *Economic Reform and Openness in China: China's Development Policies in the Last 30 Years*. *Journal of Economic Analysis & Policy*, vol. 39 no. 2, september 2009

Thompson, Drew. "China's Soft Power in Africa: From the "Beijing Consensus' to Health Diplomacy". *China Brief* 5. No. 21. 13 Oktober 2005.

Wang, Yanling. *Ten years after accession to the WTO: China and the world economy*. *The Journal of China and Global Economics*. Vol. 1 no. 1 [spring 2012] pp. 45–48

Internet:

<http://www.therichest.com/rich-list/rich-countries/the-10-biggest-importing-countries-in-the-world/>

<http://www.businessinsider.co.id/foreign-direct-investment-destination-2013-2014-2>
www.mapsofworld.com

www.tradingeconomics.com

<http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/Cina/>

<http://www.iea.org/subjectqueries/keyresult.asp?keyword ID=4103>. *Energy Security*

<http://cpc.people.com.cn?GB/64162/64168/64367/95446/4526311.html>. Laporan Jiang Zemin pada Kongres PKC XIV 12 Oktober 1992.

www.politics.as.nyu.edu/docs/IO/2800/sisson.pdf Adam Przeworski, *Democracy and Economic Development*. Department of Politics New York University

Yang, Cheng Xun. "Answer to Several Questions About Socialist Market Economy" <http://www.wrpe.org/WAPE/WAPE%20Papers202006/Yang_Cheng_Xun.pdf